



## Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

### Pagi: Gali Potensi Pendapatan Desa untuk Pembangunan

Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Mempawah di Gedung Mempawah Convention Center (MCC) Mempawah, Rabu (18/5).



**WORKSHOP** - Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Mempawah di Gedung Mempawah Convention Center (MCC) Mempawah, Rabu (18/5).

Kegiatan digelar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dibuka langsung Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi.

Kegiatan itu bertema Pengelolaan Dana Desa, Cepat, Tepat Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19.

Kegiatan workshop digelar secara langsung dan virtual melalui zoom meeting, yang diikuti Ketua Komite IV DPD RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Kepala Kanwil Dirjen Perben-

daharaan Provinsi Kalbar, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, dan BPD se-Kabupaten Mempawah.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.

"Dengan keuangan Dana Desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan alokasi anggarannya, dan nantinya dana tersebut akan

difokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa," paparnya.

Pagi menjelaskan, pendapatan asli desa yang merupakan penerimaan desa atas usaha desa sendiri, sebagai pelaksana kewenangan desa, baik dalam bentuk usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi, dan gotong royong serta lainnya masih relatif kecil.

"PAD desa relatif kecil, dibandingkan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap pengakuan masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pe-

merintah, kepentingan masyarakat berdasarkan perkara hak asal usul atau hak tradisional," jelasnya.

Pagi menegaskan, perlu menjadi perhatian seluruh aparat desa se-Kabupaten Mempawah untuk dapat menggali potensi pendapatan desa untuk pelaksanaan pembangunan desa.

"Sehingga dengan menggali potensi di desa akan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa," ujarnya.

Menurutnya, selain keuangan desa, pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Permasalahan terkait aset desa di Kabupaten

Mempawah saat ini adalah pengamanan aset desa yang belum memadai dan pengawasan terhadap aset desa belum dilaksanakan secara optimal," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran merupakan kunci penting untuk percepatan dalam penanganan Covid-19 pada masyarakat.

"Jadi, sangat perlu penanganan kolaboratif, baik dari pemerintah pusat, provinsi, daerah desa dan lainnya. Partisipasi yang aktif dari semua pihak yang berkepentingan akan menjadi satu di antara faktor penentuan keberhasilan setiap tujuan," tegasnya. **(ruben permana)**